



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Alamat : Jl. Angkrek No.103 Sumedang, No.Tlp: (0261) 201225,

Website : diskominfosanditik.sumedangkab.go.id E-mail :
diskominfosanditik@sumedangkab.go.id , 45323

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi public, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48482);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2)
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah;
12. Surat Keputusan PPID Utama

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PPID.DIK/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 01/PPID.DIK/2022 yang tercantum dalam lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 21 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN
STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,



AGUS MUSEIM, S. Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 196707271997021004

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Selaku PPID Utama
Tentang : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan
Nomor : 52 Tahun 2022
Tanggal : 21 Juli 2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01/PPID.DIK/VII/2022**

Pada Hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Bertempat di Aula Diskominfosanditik , secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada pada tabel dibawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
I						
Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum						
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/200 8 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati; b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengaduan selesai.
2.	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa; b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h; b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan	Permanen

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
3	Penegakan Perda	Jadwal / agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas 	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda
		Identitas para pelanggar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda b. Menghambat proses penegakan Perda c. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar 	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Permanen
II	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
4	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
5	Pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan; c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membawa informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Untuk menghindari penyalahgunaan data 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terbatas; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
6	Perijinan	Dokumen rekomendasi perijinan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan Online SINGLE SUBMISSION 	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin	<ul style="list-style-type: none"> a. Selama dokumen masih berlaku; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
III Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara						
7	Data dan informasi persandian	Data Materiil Sandi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
		Data Alat Pendukung Utama Persandian	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
8	Teknologi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi Bandwidth Management 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian 	Selama kode masih digunakan
		Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa 	Selama masih digunakan/berlaku

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25 	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
		User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
9	Konflik sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara 	Permamen
IV	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang					
10	Data dan dokumentasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data base kependudukan b. Data pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa f. Data pribadi pelaku usaha g. Data debitur dana bergulir h. Data pribadi pemohon ijin Data penyandang gizi buruk i. DAPODIK (Data Pokok Pendidik) 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015.Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 12 ayat 1 foingt f (Memastikan Komitmen Institusi lain Pengguna Data dalam ikut menjaga kerahasiahan Data Pendidikan) dan Pasal 17 ayat 1 berbunyi Setiap Unit, Institusi, dan atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan dapodik wajib menjaga kerahasiahan dan kemanan data 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan dan disalahgunakan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan dan institusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Permanen b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas putusan pengadilan)
11	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik 	a. Menghindari konflik antar masyarakat	Permanen

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			<p>b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia</p>	<p>antar masyarakat</p> <p>c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat</p>	<p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan</p>	
		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	<p>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin;</p> <p>d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</p>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</p> <p>b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Daerah Sumedang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Pasal 69 ayat 1</p>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</p> <p>b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>c. Perda Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>d. Perda Sumedang Nomor 10</p>	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak			
		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Permenkes 269 / Menkes / PER / III /2008 tentang Rekam Medis d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan / pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) 	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
		Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
		Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
		Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permanen; b. Atas perintah pengadilan
		Kerahasiaan Data Wajib Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 103	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terjadap kerahasiaan objek dan subjek pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan data pajak dari objek dan subjek pajak b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya. c. Tertib dalam pengelolaan Keuangan khususnya pengelolaan Pajak Daerah. 	Dikecualikan untuk Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan atau pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah
12	Data pribadi binaan di	a. Data pribadi Data Terpadu	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat	a. Melindungi data pribadi	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	Kesejahteraan Sosial Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD e. Data pribadi penerima PKH; f. Data pribadi penerima sastra	Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	rahasia	yang bersifat rahasia; b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif	bersangkutan; b. kecuali pihak yang berkepentingan dan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Wajah tersangka/pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
13	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
		Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf I; b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74; c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien; b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi Pasien	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
		Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			<p>pasal 17 huruf i</p> <p>b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan</p> <p>c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</p> <p>d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98</p>			
		Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
		Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i</p> <p>b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)</p>	<p>a. Melanggar rahasia jabatan</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</p>	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
		<p>a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli</p> <p>b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <p>c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan</p>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	<p>a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	<p>a. Permanen</p> <p>b. Mendapatkan ijin dari yang bersangkutan Mengikuti Jadwal Retensi Arsip</p>
14	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <p>a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Data pribadi pegawai ASN dan Non-ASN Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>c. Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan.</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Selama menjadi Pegawai

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<p>No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai</p> <p>d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>g. Dokumen konseling pegawai</p> <p>h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>i. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur</p> <p>k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)</p>	<p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>			
		<p>Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	<p>Mengganggu proses pengambilan keputusan</p>	<p>a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan</p> <p>b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja</p> <p>c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang</p>	<p>Sampai dengan terbitnya SK</p>
		<p>Dokumen Sidang Tim</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP,</p>	<p>Dapat menghambat</p>	<p>a. Mengamankan atau</p>	<p>Menyesuaikan jadwal retensi</p>

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	<p>pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	<p>memperlancar proses penyusunan keputusan</p> <p>b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja</p> <p>c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang</p>	arsip
		<p>a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian;</p> <p>b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j;</p> <p>b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</p>	<p>a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga obyektivitas putusan ijin</p>	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		<p>a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4;	<p>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara</p>	<p>a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara;</p> <p>b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural</p>	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
		Dokumen proses mutasi antar daerah	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan





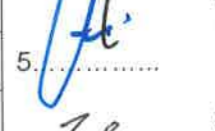







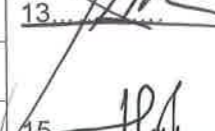



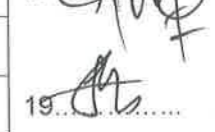




NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
V	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik					
15.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; f. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas
		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6
		Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja 	Mengikuti jadwal retensi arsip
		Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
		Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengungkap data	a. Melindungi data pribadi	Permanen

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	rahasia pribadi b. Dapat Mengganggu proses dan hasil ujian	yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil ujian	
V	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang					
16	Laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil Pengawasan b. Dokumen perolehan asset berupa tanah c. DPA yang belum diaudit d. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah f. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 h. Permendagri no 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas a pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan c. Mengganggu proses audit d. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit e. Berpotensi terjadinya penerbitan sertifikat tanah palsu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola b. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan c. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan d. Melindungi penyalahgunaan data/informasi e. Meminimalisir terbitnya sertifikat palsu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan terbitnya hasil audit b. Sampai dengan Terbitnya sertifikat c. Sampai dengan adanya persetujuan d. Permanen
		Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	
17	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 hurufi	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
18	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan :	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertentangan dengan prinsip - prinsip pengadaan dan etika pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design 	<ul style="list-style-type: none"> c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa 	<ul style="list-style-type: none"> pengadaan c. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang Pengadaan d. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang barang/jasa c. Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evalua si penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		- Tahapan Monitoring dan Evaluasi Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi				
19.	Kesehatan	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
		Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Aed Sobana	Sekcam Jabunggal	Kantor kee Jabunggal	1. 
2	Rohana	" Tanjungjajar		2. 
3	Beny Ahmadi	" Darmatala	Kec. Darmaraja	3. 
4	Wawan Setiawan	Sekcam	Kec. Cisarua	4. 
5	cucu mahrup	Kasi Yanlik	kec. Wado.	5. 
6	Tata	Kasi Yanlik	kec. Fatigede	6. 
7	Swanto	Kasubag umum	kec. Pasoh	7. 
8	OBAY SUTISNA	KASI YANLIK	Kec. GUNASRAYA	8. 
9	Perata Iwan Gunawan	KASI YANLIK	Kec. CONGGONG	9. 
10	YUNUS EKRAWA	KASI YANLIK	Kec. Cisit	10. 
11	Atik Nendah	Kasi Yanlik	Kec. Ganeas	11. 
12	Lilis Kamalawati	Kasi Yanlik	Kec. Pamulihan	12. 
13	Imas Erlis Yehelis	Sekcam Situraja	Kec. Situraja	13. 
14	Wina. Dj	Sekur kel. Pasanggahan	Kec. Sumedang Selatan	14. 
15	ADE IRWAN BUDIMAN	STAF bag. umum	Kec. Tomo	15. 
16	Mulyana	Kasi Yanlik kel. Cipamunggal	Kec. Sumedang Selatan	16. 
17	Dede. Mulaifah	Kasi Yanlik kel. Kotakulon	Kec. Sumedang Selatan	17. 
18	AA FERY MR. S. SOS	KASI YANLIK KEC. CIMALAKA	Kec. CIMALAKA	18. 
19	TAUFIA HIDAYAT	Staf bag. umum	kec. Tanjungskebon	19. 
20	Andiyana	Staf bag. Program	Kec. Cibugel	20. 
21	Muhammad Nur Ashim, S.M.	staf bag. Umum	kec. Tanjungmedar	21. 
22	WULAN LESTARI	Staf bag. Program	kec. Sumedang Utara	22.

23	YUYUN. POJALI	STAF KEGI PUBLIK	KEL. KOTAKALEN	23. Y. ceet	
24	Ruyani	Staf bag Umum	Kec. Jatnanger	24. Ruyani	
25	Ciun Wulanyani	staf bag umum	Kec. Buahdua	25. C. W.	
26	Reni Mardiana	Kasub>S umum & keu	Dinarpus	26. R.	
27	Imay K	Sekro. DPPKBPSA	DPPKBPSA	27. I.	
28	Rahmawati	Kasubag Umum	BKPSDM	28. R.	
29	Rudianso	KOMAR	RSUD	29. R.	
30	AGUS KOSASIH	Ka. Subag Lem & Uey	Inspektoran	30. A.	
31	Nur Amalina Fauziyah	Calon Pranata Komputer	DLHK	31. N.	
32	Afi Nur Fatimah	Caprakom	Disnakertrans	32. A.	
33	Rafiyandi	Calon Pracom	BKAD	33. R.	
34	Abu Beaur	Calon Pracom	Bapppp	34. A.	
35	Rifki Nur M	Calon Pracom	Diskanala	35. R.	
36	M. Ubaswara	Sekretaris	KPSU	36. M.	
37	Anggi Pradma H	Calon Pracom	BPBD	37. A.	
38	Hri Sukma	Pejabat	Dpmp	38. H.	
39	M. Rizki	PELAYANA	DIWAS SOSIAL	39. M.	
40	Idil Jps	Sekdin	Diras kop UKM PP	40. I.	
41	Eka Gungar K	Sekdin	Dinas perhidikan	41. E.	
42	ENGKOS KOSWARA	SEKPU	DISTURB	42. E.	
43	JENI HASTIATI	SEKRETARIS	Satpol pp	43. J.	
44	ANNA SABARA	SEKDIS	DINAS	44. A.	
45	ULI RANTI	SEKDIS	DIND.	45. U.	
46	Hani Idus	ah	ah	46. H.	

47	Agah M. W	Sekdis Kerbang	Kerbang	47.....
48	Asep Rahmat	sekdis	DISPABUDPORA	48.....
49	P-Supendi	Sekdis	Wespek Torat	49.....
50	Ferry F	Pikwal	Dudak	50.....
51	Kusman	Sekban Bayenda	Bayenda	51.....
52	Maman	Sekban BKAD	BKAD	52.....
53	Yauwari	Sekban Pongpote	Pongpote	53.....
54	Budi YWA S	SEKDIS	OPKAT	54.....
55	Ence Pasma.	Sekdis	DLHK	55.....
56	Suslawah	Kasubag Umum.	DLHK	56.....
57				57.....
58				58.....
59				59.....
60				60.....
61				61.....
62				62.....
63				63.....
64				64.....
65				65.....
66				66.....
67				67.....
68				68.....
69				69.....
70				70.....

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, corresponding to rows 47-56. The signatures are stylized and partially overlap the printed numbers.

71				71.....	
72					72.....
73				73.....	

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



AGUS MUSLIM, S. Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707271997021004